

BAB V

Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa wacana pemekaran Provinsi Cirebon memiliki dua kepentingan yang berbeda. Yang pertama, pihak Panitia Pembentukan Provinsi Cirebon memanfaatkan isu pemekaran ini sebagai lahan bisnis yang menjanjikan. Yang kedua, dari pihak orang kuat lokal memanfaatkan isu ini sebagai penunjang suara ketika mau maju sebagai Gubernur Jawa Barat dan kemudian jika gagal mereka berencana menjadi “raja kecil” baru di Provinsi Cirebon nantinya. Bisa dibilang wacana pemekaran ini memiliki dua kepentingan yang berbeda namun tertampung pada satu wadah.

Dalam wacana pemekaran ini Pihak P3C sebagai kelompok yang sangat vokal mendukung pemekaran Provinsi Cirebon, menilai kalau Wilayah III Cirebon akan mampu berdiri sendiri secara ekonomi jika harus berpisah dari Jawa Barat. Namun jika dilihat, PAD dari Kuningan, Indramayu, dan Majalengka terbilang cukup kecil dengan luas yang cukup besar. Dikhawatirkan jika nanti terbentuk provinsi baru, Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon juga tidak mampu untuk menutup anggaran Provinsi Cirebon nantinya.

Jika kita melihat kasus ini tentu akan sangat menarik karena pada permasalahan ini terdapat dua kepentingan yang berbeda. Pihak P3C mencoba untuk mempertahankan isu seperti ini sebagai ladang bisnis. Berdasarkan hasil penelitian, hal itu terlihat ketika menjelang pemilihan Gubernur Jawa Barat, wacana P3C selalu

muncul dan kembali memanas ke publik. P3C mencoba untuk membuka isu ini saat menjelang Pilgub Jabar demi kepentingan bisnis semata. P3C sebagai kelompok yang memiliki peran di Wilayah III Cirebon mencoba mendekati Calon Gubernur Jawa Barat untuk melihat suara dia di Ciayumajakuning ini, kemudian kelompok ini mencoba menawarkan calon ini bagaimana untuk mendapat suara yang banyak di Ciayumajakuning. Dan ketika si calon merasa gagal untuk menjadi gubernur di Jawa Barat, P3C menawarkan sebuah pilihan untuk menjadi gubernur di Provinsi Cirebon. Selain itu, pihak P3C juga mendekati beberapa aparatur negara seperti PNS di wilayah Ciayumajakuning untuk menawarkan semacam “kontrak politik” kepada pegawai-pegawai yang menginginkan jabatan penting di Provinsi Cirebon nantinya. Kontrak politik itu dikemas seperti menawarkan kepada orang lain untuk menjadi donatur bagi P3C. Semakin besar dana sumbangan yang diberikan, maka semakin besar pula kesempatan untuk mengisi jabatan penting di pemerintahan Provinsi Cirebon nantinya. Jadi strategi bisnis kelompok P3C seperti itu dan selalu muncul menjelang pemilihan Gubernur Jawa Barat.

Kemudian jika kita melihat dari sisi orang kuat lokal, tentu orang kuat lokal ini memiliki kepentingan yang berbeda. Wacana pemekaran Provinsi Cirebon dianggap sangat “seksi” sehingga saat proses pembentukan P3C, banyak aktor politik lokal yang mendukung dan membantu merealisasikan wacana ini. Dalam wacana ini memang ada banyak orang kuat lokal, namun beberapa diantaranya tidaklah konsisten pada perjalanannya. Mereka hanya memanfaatkan isu ini untuk memperoleh jabatan-jabatan tertentu di Provinsi Cirebon nantinya. Mereka hanya

sekedar mendukung saja tanpa memberikan akses politik serta akses ekonomi yang konsisten. Pada masalah ini, Yance merupakan sosok salah satu orang kuat lokal yang sangat sentral dalam wacana pemekaran Provinsi Cirebon. Selain menginisiasi wacana pemekaran Provinsi Cirebon, Yance berperan penting dalam pergerakan politik P3C selama ini. Berdasarkan hasil penelitian, Yance memberikan akses politik kepada P3C dan tentu memberikan akses ekonomi bagi P3C. Bahkan berdasarkan hasil informasi dari informan, Yance merupakan salah satu donatur terbesar bagi P3C. Yance menggandeng P3C sebagai mitra politik demi terwujudnya ambisi Yance yang ingin menjadi penguasa di Provinsi Cirebon. Pada awalnya memang Yance memanfaatkan P3C sebagai alat untuk melihat elektabilitas suara dia di Ciayumajakuning saat menjelang pemilihan Gubernur Jawa Barat. Melihat suara Yance yang cukup banyak di Ciayumajakuning, kemudian Yance tidak terlalu berambisi lagi menjadi Gubernur Jawa Barat karena beliau merasa tidak memiliki peluang di Jawa Barat, dan Yance mencoba untuk mengalihkan fokusnya untuk menjadi “raja kecil” di Provinsi Cirebon nantinya. Untuk mewujudkan ambisinya tersebut, tentu Yance harus memberikan akses politik dan akses ekonomi bagi P3C. Jadi Yance menjadikan P3C sebagai alat untuk memenuhi ambisinya tersebut.

5.2 Saran

Menurut saya jika melihat pada permasalahan tersebut, kalau pihak P3C ingin benar-benar memperjuangkan aspirasi masyarakat terkait wacana pemekaran Provinsi Cirebon, P3C harus benar-benar konsisten dalam perjalannya. Tidak

adanya konsistensi dari P3C tentu membuat wacana pemekaran Provinsi Cirebon sulit terwujud. Selama ini P3C hanya memunculkan isu tersebut hanya pada saat menjelang Pemilihan Gubernur Jawa Barat. Selain itu dari pihak P3C, orang kuat lokal (Yance), serta orang-orang yang mendukung wacana pemekaran ini, harus lebih memperhatikan berbagai aspek serta dampak dari pemekaran Provinsi Cirebon. Aspek utama yang harus dilihat adalah dari segi aspek ekonomi. Karena menurut saya jika dilihat dari PAD nya masing-masing wilayah belumlah mencukupi, mengingat luas wilayah beberapa daerah yang sangat luas seperti Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan.

Wacana pemekaran Provinsi Cirebon juga nampak sulit untuk terealisasi, karena memang kurangnya dukungan dari beberapa wilayah seperti Kabupaten Majalengka serta Kabupaten Kuningan. Selain adanya peraturan moratorium pemekaran wilayah, *response* dari masyarakat Ciayumajakuning yang menolak wacana pembentukan Provinsi Cirebon juga tidak sedikit. Banyak masyarakat Ciayumajakuning yang mulai sadar terkait wacana pemekaran Provinsi Cirebon hanya untuk kepentingan beberapa pihak saja. Selain itu, dari segi infrastruktur fisik belum cukup memadai. Dengan terbentuknya provinsi baru, akan banyak sekali anggaran-anggaran yang akan keluar demi pembangunan infrastruktur nantinya. Selain itu jika terdapat alasan karena permasalahan jarak daerah asal dengan jarak ibukota provinsi yang jauh untuk urusan administrasi bukanlah suatu permasalahan, karena jarak antara wilayah Ciayumajakuning dengan Bandung tidaklah terlalu jauh dan bisa ditempuh dalam rentang waktu 3-4 jam. Perbedaan kebudayaan yang selama

ini menjadi salah satu alasan kuat, menurut saya bukanlah menjadi permasalahan selagi dari perbedaan tersebut tidak ada konflik, terkecuali jika sering terjadi konflik hanya karena perbedaan budaya layaknya di Sulawesi atau Papua maka wilayah tersebut layak untuk dimekarkan.

